HARIAN UMUM NusaBali

DCK Warning Rekanan √ Kebut Pekerjaan Proyek

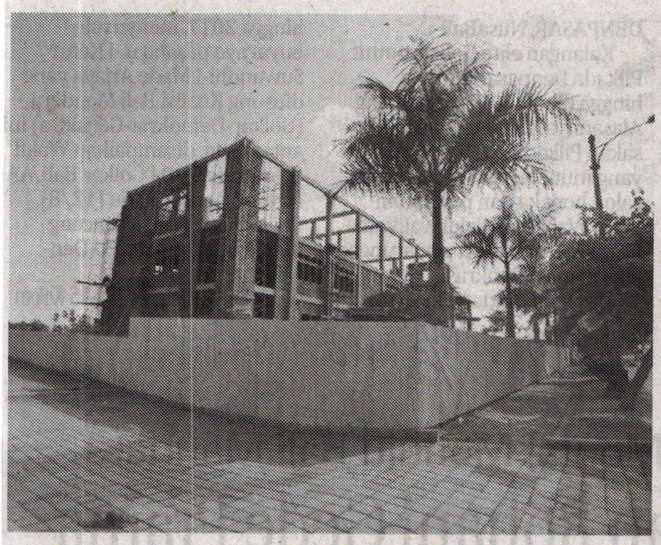

• NUSABALI/ARI SISWANTO

PEMBANGUNAN gedung koperasi merupakan salah satu proyek yang disorot oleh DCK Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Pascalibur hari raya para rekanan penggarap proyek pemerintah mendapat warning untuk bekerja lebih giat lagi. Sebab ada beberapa dari rekanan itu yang pekerjaannya tidak sesuai harapan, bahkan sejumlah kegiatan fisik progressnya sangat kecil, misalnya gedung koperasi deviasi positif hanya 1 persen; dari target 36 persen tapi realisasi hanya 37 persen.

Menyikapi masalah tersebut Dinas Cipta Karya (DCK) Badung selaku pemilik proyek mengklaim telah melakukan pengecekan. Pengarahan khusus pun diberikan termasuk meminta rekanan menambah tenaga kerja. Kepala DCK Badung Ni Putu Dessy Darmayanti tidak menginginkan proyek yang menggunakan uang rakyat tak dapat selesai tepat waktu. Proyek fisik tersebut memakai dana APBD Badung tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp 9,3 miliar lebih.

Dessy pun mengakui progress pembangunan gedung koperasi relatif kecil. "Memang masih di atas target tapi deviasinya sangat kecil. Makanya kita mengingatkan rekanan agar ngebut dalam menuntaskan pekerjaan," kata Dessy, Rabu (12/8).

Karena itu dia mengkhawatirkan pekerjaan dapat berjalan lambat. "Agar pengerjaannya lebih cepat, kami minta rekanan menambah tenaga kerja," tegasnya. Pihaknya tak menginginkan adanya proyek yang penyelesaiannya tak sesuai jadwal, karena bisa merugikan rekanan itu sendiri. Sebab, mereka harus membayar denda atau penalti dari keterlambatan.

Tak hanya terhadap proyek pembangunan gedung koperasi, Dessy juga menyatakan kepada seluruh rekanan penggarap proyek fisik milik DCK untuk mempercepat pengerjaan. Dengan begitu diharapkan pengerjaan dapat selesai tepat waktu.

Proyek milik DCK tidak hanya pembangunan gedung koperasi. Tahun anggaran 2015 ini DCK juga menggarap sejumlah proyek dengan dana yang cukup besar. Seperti pembangunan kantor Camat Petang dengan nilai kontrak Rp 6,8 miliar, penataan kawasan daya tarik wisata Taman Mumbul Desa Sangeh dengan nilai Rp 3,8 miliar lebih, pembangunan Puskesmas I Abiansemal dengan anggaran Rp 17,8 miliar lebih. **as**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi di Jembrana

Hakim Ancam Proses Pemilik SPBU

● NUSABALI/REZA

PEMILIK SPBU Penyaringan, Dewa Ayu Ari usai bersaksi dalam kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi Jembrana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (12/8).

DENPASAR, NusaBali

Pemilik SPBU Penyaringan, Mendoyo, Jembrana, Dewa Ayu Ari diancam dipidana oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar karena memberikan keterangan berbelit dan terkesan berbohong dalam sidang dugaan korupsi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dengan terdakwa anggota DPRD Jembrana, Made Sueca Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (5/8).

Majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili yang memeriksa saksi Dewa Ayu Ari sudah mencurigai gelagat buruk pemilik SPBU ini. Pasalnya, setiap kali ditanya, Dewa Ayu Ari selalu memberikan jawaban berbelit. Seperti saat ditanyakan siapa yang selama ini mengelola SPBU. Dewa Ayu Ari mengatakan jika SPBU ini baru resmi menjadi miliknya pada 2015. Namun sejak 2007 SPBU dikelola manajer, I Ketut Suryanta. "Saya tidak tahu apa-apa karena yang mengelola manajer," jelasnya.

Hakim yang tidak percaya begitu saja mencecar pemilik SPBU ini terkait keberadaan manajer yang tidak datang dalam sidang, padahal sudang dipanggil. Dewa Ayu Ari mengatakan jika manajer sedang ada upacara ngaben. Saat ditanya, apakah ia mengetahui tentang kasus korupsi ini, Dewa Ayu Ari mengatakan tidak tahu. "Saya tidak tahu apa-apa," jelasnya.

Dewa Ayu Ari lalu mengatakan jika sejak 2015 manajer SPBU sudah diganti dengan manajer yang baru. Majelis hakim menanyakan apakah pergantian ini terkait kasus korupsi yang menjadikan Sueca terdakwa? Dengan polos, Dewa Ayu menganggukkan kepalanya.

"Tadi anda bilang tidak tahu kasus ini. Tapi sekarang anda bilang manajer diganti karena kasus ini. Bagaimana ini," tanya majelis hakim. Tidak puas dengan pemeriksaan ini, majelis hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suhadi untuk menghadirkan manajer SPBU yang lama dan yang baru untuk dikonfrontir dengan pemilik SPBU.

Majelis hakim mengancam, jika dalam konfrontir nanti ada ketidak cocokan keterangan, pihaknya akan meminta jaksa memproses pemilik SPBU ini. "Jangan kira kami tidak bisa memproses anda. Saya minta minggu depan anda hadir bersama manajer yang baru dan jaksa supaya bisa menghadirkan manajer yang lama untuk dikonfrontir," tegas majelis hakim.

Selain Dewa Ayu Ari, JPU juga menghadirkan saksi lainnya, yaitu Abdul Haris Isnaini yang merupakan rekan bisnis UD Sumber Maju milik terdakwa. Dalam keterangannya, Isnaini mengaku tidak tahu menahu soal rekomendasi yang menjadi masalah tersebut karena hanya memiliki hubungan bisnis. "Saya hanya membeli serabut kelapa dari UD Sumber Maju. Tidak tahu masalah itu," tegasnya. **rez**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM
NusaBali

Kasus GOR Susut Bakal Kembali Digeber

BANGLI, NusaBali

Setelah cukup lama tidak terdengar kabarnya, kelanjutan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pembangunan proyek gedung olahraga (GOR) di Kecamatan Susut, kembali mengemuka. Aparat Kejaksaan Negeri Bangli dipastikan bakal kembali menggeber kasus tersebut.

"Kita bakal kembali melanjutkan penyelidikan kasus pembangunan GOR ini," ujar Kajari Bangli Ida Ayu Retnasari, belum lama ini.

Didampingi oleh Kasi Pidsus, Bagus Putra, mengaku segera bakal mengambil berkas yang kini ada di pihak BPKP. Pasalnya, saat ditangani Kejari Gede Nurmahendra, kasusnya tengah masuk ke pihak BPKP.

Sekedar mengingatkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli, pada tahun 2013 lalu sempat melakukan lidik mengenai pembangunan GOR Susut.

Bahkan sejumlah dokumen penting termasuk orang-orang yang diduga tentang dengan GOR tersebut sudah ada yang diperiksa.

Namun, sejalan dengan adanya pergantian Kepala Kejaksaan (Kejari) Bangli, kasus ini bak ditelan bumi.

Informasi yang dihimpun, bangunan GOR Susut yang berlokasi tepat di belakang SMAN 1 Susut, kondisinya belum rampung karena belum difinishing. Karenanya, GOR yang pembangunannya didanai pusat hingga kini belum pernah dipakai untuk even olahraga. **cr53**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015
Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

Pastika Minta Evaluasi Beasiswa Miskin

Rapat Evaluasi juga Bahas Politik di Bali

Beasiswa miskin untuk SMK langka peminat diberikan kepada 156 siswa, masing-masing mendapatkan beasiswa Rp5 juta sehingga total alokasi anggaran yang disiapkan Rp780 juta.

● IST

Gubernur Pastika didampingi Wagub Sudikerta (kiri) dan Sekprov Tjok Pemayun saat Rapat Evaluasi Program Pembangunan Pemprov Bali Triwulan II, Rabu (12/8).

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Made Mangku Pastika meminta jajaran Disdikpora Bali untuk mengevaluasi pemberian beasiswa miskin kepada siswa-siswi yang bersekolah di SMK yang tergolong langka peminat.

"Kenapa itu langka peminat, coba dievaluasi secara realistis. Kenapa tidak dibiayai sekolah yang banyak peminat tetapi siswanya miskin," kata Pastika saat memimpin Rapat Evaluasi Program Pembangunan Pemprov Bali Triwulan II Tahun 2015, di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Niti Mandala Denpasar, Rabu (12/8) pagi.

Mantan Kapolda Bali itu berpandangan jika memang SMK tersebut sudah langka peminat, sebaiknya tidak dipaksa-paksa para siswa untuk bersekolah di sana. Menurut dia, akan menjadi mubazir kalau membiayai orang bersekolah, namun akhirnya menjadi pengangguran. "Saya heran kok membiayai orang yang tidak berminat. Ya sudah kalau tidak berminat," selorohnya.

Dalam paparan Disdikpora Provinsi Bali disebutkan bahwa beasiswa miskin untuk SMK langka peminat diberikan kepada 156 siswa, masing-masing mendapatkan beasiswa Rp5 juta sehingga total alokasi anggaran yang disiapkan Rp780 juta.

Beberapa program dan jurusan di SMK yang langka peminat diantaranya adalah Seni Pedalangan, Kriya dan Logam di SMKN 1, SMKN 2, dan SMKN 3 Sukawati, Gianyar.

Di sisi lain, Pastika juga menyoroti program pelatihan kerja yang dirancang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bali yang juga kurang diminati oleh generasi muda.

"Orang sudah tidak berminat menjadi tukang jahit, kenapa dipaksa menjadi tukang jahit, ini 'ngabisin duit saja. Seharusnya

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 3

HARIAN UMUM
NusaBali

Sambungan - - -

diikuti orang maunya jadi apa, ya sudah dilatih itu. Ikutin saja maunya apa," ucapnya.

Pastika menyentil kalau memaksakan satu hal yang tidak diminati atau tidak disukai bisa menimbulkan masalah. Dia langsung mencontohkan pencalonan di Pilkada, ada yang tidak berminat tetap dipaksa untuk dicalonkan. "Jangan dipaksa-paksa. Kalau sudah nggak berminat menjadi calon ya jangan," ujar Pastika berkelakar disambut sorakan pejabat yang hadir.

Pastika mengingatkan jangan sampai dinas terkait sekadar programnya berjalan tetapi kurang diminati oleh masyarakat. Dia mengusulkan bisa dibuat pelatihan untuk bekerja di kapal pesiar yang akan banyak diminati.

"Kalau memang tidak ada peminat, 'ngapain nyari ke kampung-kampung. Coret yang sudah tidak ada peminatnya," katanya.

Selain masalah anggaran, program kerja, evaluasi kemarin juga dibahas masalah politik di Bali dengan Pilkada di 6 kabupaten dan kota. Pemprov Bali telah mengirimkan Pejabat Asistensi ke Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada.

Inspektur Pemprov Bali I Ketut Teneng mengatakan, pejabat yang melakukan asistensi adalah Kepala BKD Pemprov Bali I Ketut Rochineng untuk di Kota Denpasar, Ketut Lihadnyana yang menjabat Kepala BPMD asistensi di Kabupaten Tabanan, Dewa Eka Wijaya Wardana yang menjabat Asisten I melakukan asistensi di Karangasem, I Wayan Gunaja yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan asistensi di Kabupaten Bangli. Sementara Teneng sendiri melakukan asistensi di Kabupaten Badung.

"Asistensi ini tujuannya melapis Penjabat Bupati yang sudah dilantik. Karena mereka ini kan baru di daerah tersebut. Disamping ada persoalan psikologis ada juga persoalan pengalaman. Jadi kita ditugaskan Pak Gubernur mengawal bersama-sama teman-teman di 5 kabupaten ini," ujar Teneng.

Teneng mengatakan lima tim asistensi yang sudah ditunjuk segera bergerak. Selain mengawal proses pemerintahan di kabupaten dan kota juga mengawal netralitas PNS dalam masa Pilkada. "PNS dan pejabat harus benar-benar konsisten dan netral dengan posisinya. Bekerja dan bekerja. Nggak ada urusan dengan politik. Tahu politik boleh, tetapi jangan berpolitik praktis. Apalagi dihimpun, mau diarahkan. Kita tegas itu tidak boleh ada," tegas Teneng. **nat**

2

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015

Hal : 3

HARIAN UMUM
NusaBali

Tenaga Kontrak di 3 SKPD Sulit Dirasionalisasi

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng telah melaksanakan upaya rasionalisasi tenaga kontrak menyusul desakan dari Komisi I DPRD Buleleng. Hanya saja, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit dirasionalisasi. Masalahnya, tiga SKPD tersebut sangat membutuhkan SDM yang cukup banyak untuk mendukung kinerjanya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng, Dewa Ketut Puspaka usai rapat membahas KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun 2015, Rabu (12/8) siang. Dikatakan, tiga SKPD yang sulit jumlah tenaga kontraknya dirasionalisasi masing-masing Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Pendidikan (Disdik) dan RSUD Buleleng. Masalahnya tiga SKPD itu membutuhkan SDM yang banyak untuk mendukung kegiatannya. DKP misalnya, dalam rangka menjaga kebersihan kota dan juga pertamanan dibutuhkan tenaga yang memadai. Apalagi jika merekerut PNS, tingkat pendidikannya tidak mendukung untuk kegiatan tersebut. "Mana ada CPNS dari tingkat SD dan SMP, untuk kebersihan, jelas ini sulit kita capai, sehingga diperlukan tenaga kontrak. Kemudian pada Dinas Pendidikan, karena selama ini kita selalu kekurangan guru PNS, apalagi ada moratorium, sehingga perlu tenaga kontrak, demikian juga dengan di RSUD, selama ini kita juga masih kekurangan tenaga kesehatan," jelasnya.

Menurut Puspaka, diluar tiga SKPD tersebut, pihaknya sudah laksanakan rasionalisasi dengan memberdayakan tenaga kontrak yang ada. Bahkan, bila ditemukan tenaga kontrak yang tidak sesuai, kontraknya tidak diperpanjang. "Kita sudah maksimalkan yang ada, justru kita tidak ada penambahan tenaga kontrak di luar tiga SKPD, DKP, Diknas dan RSUD. Apalagi anggarannya sudah dibahas diawal," ujarnya.

Komisi I DPRD Buleleng mempermasalahkan keberadaan tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng. Selain dicurigai terus bertambah, keberadaan mereka juga diangap membebani APBD. Komisi I pun mendesak langkah rasionalisasi tenaga kontrak tersebut.

Anggota Komisi, I Wayan Teren mengungkapkan, jumlah tenaga kontrak di beberapa instansi sudah cukup banyak. Bahkan, diketahui seorang tenaga kontrak tidak jelas tugas dan tanggungjawabnya. Diantara mereka bahkan diketahui baru bekerja antara satu sampai enam bulan. "Jumlahnya terus bertambah dan pernah saya temukan di satu instanasi ada yang baru sebulan dan ada enam bulan bekerja. Jadi masih ada penambahan pegwai kontrak baru dan kalau kita cermati ini sudah sangat melebihi," kata politisi Hanuar asal Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi lainnya, I Putu Tirta Adnyana. Bahkan dari data yang dihimpun, jumlah tenaga kontrak yang tercatat sudah mencapai 2.810 orang. Jumlah itu belum termasuk tenaga kontrak di RSUD Buleleng yang juga terbilang cukup banyak. Dari jumlah tenaga kontrak itu, diperkirakan menyedot anggaran setiap tahunnya mencapai Rp 43 miliar, karena rata-rata gaji tenaga kontrak antara Rp 700 ribu hingga Rp 1,5 juta, perorang perbulan. "Ini cukup membebani APBD kita tiap tahunnya," ujar politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.

Terhadap persoalan itu, Komisi I mendesak agar Pemkab Buleleng mengambil upaya rasionalisasi jumlah tenaga kontrak. Ketua Komisi, Putu Mangku Mertayasa menyatakan, rasionalisasi yang diinginkan bukan berarti harus memangkas jumlah tenaga kontrak. Rasionalisasi yang dimaksud, memberdayakan tenaga kontrak yang ada dalam peningkatakan pelayanan, sehingga setiap tenaga kontrak memiliki tugas dan tanggungjawab yang jelas. "Sehingga mereka (tenaga kontrak,red) lebih produktif dalam peningkatan pelayanan. Bagi yang tidak produktif, ini yang perlu dirasionalisasi, sehingga dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak," jelasnya. **k19**

Edisi : Kamis, 13 Agustus 2015
Hal : 3